



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : Negara Harus Jaga Kebhinekaan  
**Tanggal** : Rabu, 11 Januari 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 4

[JAKARTA]Kebhinekaan bangsa Indonesia sedang terancam oleh radikalisme. Jika tidak segera diatasi, radikalisme akan menjadi virus yang mematikan bangsa Indonesia. Untuk itu, negara harus hadir bersama masyarakat menjaga kebhinekaan dan mencegah radikalisme. Hal tersebut merupakan rangkuman dari diskusi kebangsaan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) bersama Student Peace Institute (SPI) di Jakarta, Senin (9/1). Diskusi tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Umum PP PMKRI Angelius Wakekako, Direktur Eksekutif SPI Doddy Abdallah, Koordinator Rumah Pelita Slamet Abidin, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai dan pakar perbandingan agama Dr Media Zainun Bahri. Angelius menekankan fakta kebhinekaan merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat segenap anak bangsa. Untuk mengawal kebhinekaan dan menjaga harmoni kebangsaan dari ancaman radikalisme itu merupakan tanggung jawab bersama warga negara. Doddy Abdallah lebih melihat radikalisme semacam virus yang mengancam dan bahkan bisa mematikan. Virus tersebut telah menyebar ke dalam perilaku warga negara khususnya pada kelompok usia dini seperti pelajar dan mahasiswa. Karena itu, SPI mempunyai tanggung jawab untuk menghilangkan virus-virus tersebut. Slamet Abidin dalam kesempatan tersebut menyoroti kehadiran Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai telah merusak citra baik Islam di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa potensi perpecahan di tubuh NKRI semakin tinggi apabila kehadiran kelompok ini tidak dilihat secara serius oleh negara. "Rizieq Syihab adalah sosok yang bisa menimbulkan perpecahan dengan ujaran kebencian, penistaan dan pemaksaan kehendak. Karena itu orang-orang seperti ini tidak boleh ada di Indonesia," tandas Slamet. Natalius Pigai melihat negara harus bertanggung jawab dalam setiap persoalan yang terjadi di Indonesia termasuk radikalisme. Kehadiran negara menurutnya bisa termanifestasi dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang jelas dan adil untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Sementara itu, Media Zainun Bahri mengajak seluruh audiensi untuk secara inklusif dan objektif melihat dan memahami dogma-dogma iman yang berbeda. "Studi perbandingan agama sangat dibutuhkan dalam menjaga kebhinekaan," tegas Media. [YUS/H-12]